****

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax 580692

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

**Juru Bicara: Ir. Atmaji**

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna serta Pimpinan Dewan Lainnya.

Yang saya hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Yang saya hormati, Anggota DPRD DIY.

Yang saya hormati, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran Eksekutif.

Yang saya hormati, seluruh rekan-rekan Wartawan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Salam sejahtera untuk kita semua,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia.

***Sidang Paripurna yang Kami Hormati,***

Pada kesempatan yang sangat mulia ini, ijinkanlah Fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Haji tahun 1443 H kepada seluruh Calon Jamaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga selalu dilimpahkan kemudahan dan kesehatan selama menjalankan seluruh rukun, wajib dan sunah haji, dan pulang ke tanah air mendapatkan Haji yang mabrur/Hajjah yang mabrurah. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi PAN untuk membacakan Pemandangan umum Fraksi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Daerah Isitimewa Yogyakrta Tentang Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

Memasuki bulan Juni atau akhir semester pertama, DPRD mulai disibukkan dengan siklus anggaran yang harus dilakukan baik oleh Kepala Daerah maupun DPRD, yakni berkaitan dengan penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Daerah pasal 194 ayat 1 mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah. Oleh karenanya, bulan Juni menjadi rentang waktu yang sangat penting bagi DPRD untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan dan pemanfaatan APBD sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyampaian Penghantaran Gubernur DIY terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Juni 2022, kami apresiasi sebagai wujud kesungguhan tanggungjawab Gubernur dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran kepada masyarakat. Demikian pula dengan mendasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021, yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk yang keduabelas kalinya. Semua ini pantas untuk mendapatkan apresiasi dari kita semua. Namun demikian, pengelolaan anggaran yang baik bukanlah hanya pada dimensi kedisiplinan waktu dalam mempertanggungjawabkan, maupun dimensi penghargaan oleh lembaga pemeriksa, akan tetapi, penghargaan tertinggi atas keberhasilan pengelolaan anggaran adalah manakala masyarakat telah merasakan hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat dengan mampu mengangkat harkat dan martabat kehidupan menjadi lebik baik dari waktu ke waktu.

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi momentum pula untuk melihat seberapa serius Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan dan catatan hasil pemeriksaan BPK RI. Tindaklanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, akan menjadi bagian tidak terpisahkan terhadap keluarnya hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. Oleha karena itu, menjadi kewajiban bagi Gubernur dan jajaran Eksekutif untuk menyertakan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD secara keseluruhan.

Atas Penghantaran Raperda Pertanggubgjawaban APBD serta tambahan penjelasan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rapat Badan Anggaran, maka Fraksi PAN mohon perkenan untuk menyampaikan pertanyaan, pernyataan maupun permintaan penjelasaan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp5,675 trilyun (lima trilyun enam ratus tujuh puluh lima milyar rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp5,703 trilyun (lima trilyun tujuh ratus tiga milyar rupiah) atau 100,50%. Namun demikian, terhadap capaian ini Fraksi PAN memberikan pencermatan bahwa komposisi Pendapatan dalam realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021, terlihat proporsi melalui Dana Transfer Pemerintah Pusat, masih sangat dominan dibandingkan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan transfer mencapai Rp3,79 trilyun atau 99,71% merupakan 65% dari total pendapatan. Perolehan PAD sebesar Rp1,90 trilyun atau tercapai 102,11% dari sisi jumlah menunjukkan kenaikan, namun dari sisi prosentase masih lebih rendah capainnya dengan tahun lalu sebesar 104,27%. Dalam kompoisi pendapatan juga menempati urutan kedua dengan 33% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik sebesar Rp7,32 milyar atau tercapai 96,64 % atau kurang dari target yang dicanangkan sebesar Rp7,58 milyar. Untuk itu kami mendorong agar PAD dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk terus ditingkatkan. Bagaimanakah upaya Pemda DIY dalam meningkatkan PAD?
2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,90 trilyun masih menunjukkan komposisi angkia yang belum berimbang antar satu komponen dengan komponen lainnya. Pemasukan dari PAD masih didominasi oleh Pajak Daerah sebesar Rp1,69 trilyun atau tercapai sebesar 101,2%. sementara itu untuk Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meskipun pemasukan mencapai diatas 100% dari target, namun angkanya belum siginifikan untuk mengimbangin Pajak Daerah. Sementara itu pendapatan dari sektor Pajak Daerah masih pula didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagaimanakah antisipasi Pemerintah DIY dalam menjaga kualitas lingkungan udara dan semakin berkembangnya kendaraan bertenaga listrik? Pada satu sisi akan sangat positif bagi kelestarian lingkungan, namun sisi lain akan mengurangi pendapatan daerah dari PBBKB.
3. Mencermati pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, Fraksi PAN memberikan catatan perlunya Gubernur untuk mencari terobosan-terobosan guna meningkatkan pendapatan tersebut. Jika kita cermati dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida anggaran Rp 110,73 juta (realisasi 100%), PT. Bank BPD DIY anggaran Rp 84,95 milyar (realisasi 100%), PT. Anindya Mitra Internasional anggaran Rp 1,04 milyar (realisasi 100%), PT. Tarumartani anggaran Rp 3,84 milyar (realisasi 100%) keseluruhan capaian adalah 100% sesuai dengan target. Sementara pendapatan dari Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) anggaran Rp3,97 milyar, justeru terealisasir Rp 6,39 milyar, sehingga melebihi dari target sebesar Rp2,41 milyar atau tercapai 160%. Padahal bentuk kelembagaan BUKP selalu mendapat catatan dari BPK RI karena dianggap belum memadai. Mohon penjelasan dari Gubernur.
4. Terkait dengan peningkatan Dana Keistimewaan hingga Rp1,32 trilyun Fraksi PAN menyambut baik sebagai tambahan "energi" baru bagi pembangunan di DIY. Namun demikian, Fraksi PAN perlu mempertanyakan kepada Gubernur, seberapa besar pemanfaatan Dana Keistimewaan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012? Seberapa majukah kebudayaan DIY dengan telah terbangunnya gedung Taman Budaya di masing-masing Kabupaten diseluruh DIY? Mohon tanggapannya.
5. Berkaitan dengan SILPA Tahun Anggaran 2021, sebagaimana Penghantaran Gubernur dan Penjelasan TAPD, SiLPA tahun 2021 sebesar Rp 554,487 milyar (lima ratus lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), maka ada kenaikan dibanding tahun SILPA Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp484,453 milyar (empat ratus delapan puluh empat milyar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah). Angka ini tentu pantas untuk kita evaluasi bersama untuk menurunkan angka SiLPA pada tahun-tahun mendatang. Fraksi PAN bukan hanya menanyakan kepada Eksekutif terkait dengan kenaikan tersebut, namun juga meminta kepada Gubernur untuk mematok target penurunan SiLPA pada tahun-tahun anggaran mendatang dengan melakukan perencanaan secermat mungkin. Jika dicermati lebih mendalam maka selain faktor pendapatan melebihi target sebesar Rp28,2 milyar, namun juga disumbangkan oleh efisiensi dan sisa lelang antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp116,7 milyar dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp227,5 milyar. Hal ini memperlihatkan perencanaan yang kurang cermat, ataupun ada sebab lain yang mengiringi pada saat pelaksanaan anggaran. Untuk itu Fraksi PAN mohon penjelasan kepada Gubernur.
6. Berkaitan dengan Belanja Modal, Fraksi PAN mencermati ada berbagai rincian pembelanjaan, baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan. Total Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah DIY menunjukkan angka yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp723,3 m,ilyar, namujn hanya terealisir sebesar Rp654,8 milyar. Sehingga ada sisa dana Rp68,4 milyar. Jika perencanaan dilakukan dengan cermat, maka sisa dana sebesar Rp68,4 milkyar tersebut dapat dialokasikan untuk Belanja Modal yang lain yang menunjang percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mohon tanggapan Gubernur.

1. Membaca data realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, realisasi anggaran dibawah target. Belanja Hibah terserap 95,45% atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp41,85 milyar, serta Belanja Bantuan Sosial terserap sebesar 76,97% sehingga ada sisa anggaran Rp6,75 milyar. Jika Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut menyangkut kebutuhan riil masyarakat, maka tentu capaian kinerja tersebut akan merugikan masyarakat. Fraksi PAN mohon penjelasan Gubernur terkait dengan kinerja anggaran yang dibawah target.
2. Terkait dengan Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp 90,73 milyar dengan realisasi sebesar Rp 53,32 milyar atau 58,77% sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 37,41 milyar. Fraksi PAN meminta untuk perencanaan anggaran pada rekening Belanja Tidak Terduga benar-benar mendasarkan pada perhitungan yang cermat. Sehingga penempatan pada rekening tersebut bukan seperti “menabung/menyimpan” dana idol guna mendapatkan SiLPA. Sehingga tidak ada dana “menganggur” yang tidak bisa termanfaatkan.
3. Tahun Anggaran 2021 adalah tahun pemulihan dari wabah Pandemi Covid-19. berbagai kebijakan telah disusun sebagai upaya peningkatan kesehatan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. Kami mohon penjelasan kepada Gubernur, berkaitan dengan pengaruh dari kebijakan *refocussing* anggaran sejak tahun 2020, serta kebijakan penanganan kesehatan pada tahun 2021, apakah telah memberikan dampak dan pengaruh positif dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021? Secara keseluruhan pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021, seberapa besar memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi masyarakat? Hal ini perlu kami tanyakan untuk mencvegah terjadinya kemiskinan ekstrim di DIY sebagai akibat pandemi Covid-19.
4. Terhadap temuan dari LHP BPK RI berupa :
5. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Pada BUKP Belum Memadai;
6. Belanja Hibah Barang pada Dinas Kebudayaan dan Hibah Uang pada Dinas Pariwisata Belum sesuai petunjuk tekhnis pelaksanaan Hibah;
7. Pembebasan Tanah untuk jalan Segmen Garongan Congot belum didukung penyediaan dana secara memadai;
8. Pelaksanaan Belanja Modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan;
9. Pengelolaan Piutang Pajak, Retrebusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
10. Pengelolaan persediaan obat pada instalasi Farmasi Dinas Kesehatan belum memadai;
11. Pengelolaan atas Barang Milik Daerah belum tertib.

Fraksi PAN memberikan catatan secara khusus kepada Gubernur untuk memperhatikan temuan tersebut dengan tindak lanjut yang memadai. Hal ini mengingat beberapa temuan seperti Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Pada BUKP Belum Memadai dan Pengelolaan atas Barang Milik Daerah belum tertib, telah menjadi temuan dan catatan BPK RI bertahun-tahun lamanya. Kami masih mengingat bahwa pengelolaan barang milik daerah yang belum tertib pengelolaannya, bahkan menjadi paragraf pengeculaian pada saat DIY meraih opini wajar tanpa pengecualian dua belas tahun yang lalu. Demikian pula dengan temuan tentang Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Pada BUKP Belum Memadai, juga sudah menjadi temuan sejak lama. Oleh karena itu, terhadap kedua hal tersebut, bersama dengan lima temuan BPK RI lainnya, Fraksi PAN meminta kepada Gubernur untuk segera menindaklanjuti dan mencari solusi yang “cespleng”, sehingga tidak menjadi temuan BPK RI pada masa-masa mendatang.

Demikian pemandangan umum Fraksi PAN DPRD DIY terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY TA 2020. Terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas kekhilafan.

Billahittaufiq wal Hidayah,

**Wassalamu alaikum Wr. Wb.**

**Yogyakarta, 17 Juni 2022**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

**DPRD DIY**



**Ir. ATMAJI drg. Hj. HANUM SALSABIELA, MBA**

 Ketua Sekretaris